

***POLITICAL LITERACY* BAGI PEMILIH PEMULA MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DI PC IPNU-IPPNU KABUPATEN BREBES**

Nafita Rizqiyatul Azkiya

*Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Sebelas Maret*

ABSTRAK

Nafita Rizqiyatul Azkiya. K6416036. ***POLITICAL LITERACY* BAGI PEMILIH PEMULA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DI PC IPNU-IPPNU KABUPATEN BREBES**. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pendidikan politik dalam meningkatkan *political literacy* di PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes; 2) Tingkat *political literacy* PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari informan, lembar angket serta studi dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket dan studi dokumen. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model Milles dan Hubermas yaitu tiga alur kegiatan yang akan dilakukan secara bersamaan yakni melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pendidikan politik pada pelaksanaannya diwujudkan melalui diadakannya seminar milenial yang bertujuan memberikan pendidikan sebagai warga negara Indonesia dalam hidup berdemokrasi, memberikan pendidikan politik untuk bekal masa depan., dan memberikan pemahaman politik berkemanusiaan melalui seminar milenial “pendidikan memilih” dan sosialisasi pemilih pemula yang dilaksanakan setiap setahun sekali, serta bertujuan sebagai pendidikan politik khususnya pemilih, penanaman nilai-nilai demokrasi, memberikan pemahaman kepada pemilih akan mekanisme pemilihan kepada daerah dan bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai landasan-landasan normatif dan hukum positif yang mengatur mengenai pilkada, sehingga para anggota dapat memiliki kesadaran demokrasi dalam kehidupan bernegara. PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes melaksanakan Pendidikan Politik yang bertujuan untuk bekal masa depan anggota dan untuk meningkatkan literasi politik anggotanya; 2) Tingkat *political literacy* PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes menunjukkan 69% pengurus dan anggota melek akan politik sesuai dengan angket yang diisi. Keseluruhan tersebut mereka paham akan literasi politik dan mengkan ilmu atau pengetahuan literasi politik mereka dalam kehidupan, seperti mematuhi aturan politik dan memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum. Hal ini menunjukkan Literasi Politik bagi pemilih pemula dalam pendidikan politik IPNU-

IPPNU Kabupaten Brebes cukup baik.

Kata Kunci : Literasi Politik, Pendidikan Politik, Pemilih Pemula.

ABSTRACT

Nafita Rizqiyatul Azkiya. K6416036. POLITICAL LITERACY FOR BEGINNER VOTERS THROUGH POLITICAL EDUCATION IN PC IPNU-IPPNU KABUPATEN BREBES. Thesis, Surakarta. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret Surakarta. 2021

This study aims to investigate: 1) The implementation of political education for increasing political literacy in PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes;

2) The level of political literacy in PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes.

This study is qualitative research. The research data was from informants, questionnaire sheets, and documents related to the research subjects. The researcher did some sampling techniques through interviews, questionnaires, and document studies. The researcher adopted the Milles and Hubermas model for testing the validity of the data. It is called three flow activities that consist of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification.

The conclusions are: 1) The implementation of political education in its implementation is realized through by holding a millennial seminar that aims to provide education as Indonesian citizens in democratic life, provide political education for the future, and provide humane political understanding through millennial seminars on "voting education" and socialization of beginner voters which is held once a year, and aims as political education, especially voters, inculcating democratic values, providing understanding to voters about the mechanism of the elections, and a form of socialization to the public regarding the normative and positive legal foundations governing elections, so that members can have an awareness of democracy in state life. PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes carries out political education which aims to provide for the future of members and to improve the political literacy of members; 2) The political literacy level of the PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes shows that 69% of the members and cadres are politically literate according to the filled out questionnaire . They understand and implement political literacy in their life, such as obeying political rules and giving their voting rights during elections. It shows that political literacy for beginner voters in the political education of PC IPNU- IPPNU Kabupaten Brebes is good.

Keywords: Political literacy, Political Education, Beginner Voters

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Negara yang sangat mulia tersebut bisa dijadikan semangat untuk bisa bangkit melihat pendidikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam diri seseorang dan masyarakat. Pendidikan diharapkan tidak hanya transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi harus lebih dari itu yaitu pembiasaan dan pembentukan sikap dan perilaku yang baik pada setiap insan. Tujuan kehidupan bernegara tersebut di atas akan lebih mudah untuk dilaksanakan apabila semua komponen yang ada bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan. Salah satu komponen penting yang harus hadir dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah para generasi muda. Generasi muda diharapkan mampu ikut serta dalam kehidupan Negara. Dalam hal ini adalah politik. Sehingga para generasi muda khususnya para pemilih pemula diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat (4) dalam undang-undang tersebut Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rusadi Kantaprawira (1988: 54) memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktivitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya dalam aspek kognitif, wawasan kritis, sikap positif dan keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat

mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik.

Pergulatan politik sebagai konsekuensi demokrasi selalu dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Perbincangan politik ramai riuh di meja-meja seminar dan panggung-panggung intelektual. Demokrasi telah membuka ruang keterlibatan (*engagement space*) bagi seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas dengan membongkar sekat-sekat primordial seperti agama, etnis, kelas, gender, ras, untuk terlibat aktif dalam menentukan pilihan juga mempengaruhi kebijakan yang ada. Tidak terkecuali, mereka para generasi muda yang sekaligus menjadi pemilih pemula, generasi muda atau pemilih pemula menjadi mangsa dan gerak gerik politik yang syarat akan taktik licik dan ilusi janji-janji revolusioner. Maka peningkatan literasi politik (*Political literacy*) generasi muda adalah hal penting untuk diperhatikan. Dalam urusan politik, generasi muda dan para pemilih pemula bergerak bukan atas dasar kesadaran kritis. Para generasi muda dan pemilih pemula belum sepenuhnya memiliki kesadaran politik (*political unconsciousness*) yang memadai. Untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda dan pemilih pemula dibutuhkan aktivitas literasi bukan indoktrinasi. Pemilih pemula harus mampu membaca peluang dan tantangan dari perkembangan politik kekinian.

Denver dan Hands (1990) dalam Karim dkk (2015: 5), Literasi Politik (*political literacy*) merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga negara. Pengetahuan dan pemahaman ini oleh Cassel dan Lo (1997) sebagaimana dikutip Karim dkk (2015:5) disebut sebagai *political expertise* dan *political awareness*, yang intinya merujuk pada maksud sejauh mana seorang individu warga negara memberi perhatian dan memahami isu-isu politik.

Literasi politik ada sebuah upaya pemahaman untuk memahami isu atau informasi seputar politik. Beberapa faktor berpengaruh terhadap literasi politik

masyarakat yaitu, “kebutuhan akan informasi, lalu strategi dalam mencari informasi, kemudian komunikasi dalam menyampaikan informasi yang didapatkan. Dari faktor-faktor tersebut, maka dapat diketahui nantinya sampai mana tingkat dari literasi politik pada masyarakat kemudian setelah mengetahui hasilnya bisa langsung dibuatkan kebijakan yang mampu meningkatkan literasi politik masyarakat”. Literasi tentunya penting untuk semua kalangan masyarakat termasuk generasi muda sebagai warga negara. Melalui pengetahuan tentang politik, mereka setidaknya akan paham serta mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam upaya berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Literasi politik dan pendidikan politik IPNU-IPPNU Pimpinan Cabang (PC) Brebes sangat menarik untuk diperhatikan, pasalnya pimpinan cabang ini sangat aktif dalam kegiatan kepemudaan. Anggota dan pengurus IPNU-IPPNU Brebes ini didominasi oleh pelajar yang berada di jenjang SMA-Perguruan Tinggi, dimana pada usia SMA-Perguruan Tinggi merupakan usia pada awal pemilih atau biasa disebut pemilih pemula.

Pendidikan Politik mestinya sebagian sudah didapat pelajar NU pada sekolah masing-masing dan dapat diterapkan di lingkungan organisasi dan masyarakat serta literasi politik mereka sedikit sudah didapat melalui buku pelajaran disekolah maupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk pemilih pemula dan pemilihan umum. PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ini juga telah menggelar sosialisasi pemilihan umum pada tahun lalu dalam mempersiapkan anggota dan pengurusnya dalam pemilihan presiden 2019. PC IPNU-IPPNU sedikit banyak sudah melaksanakan birokrasi dengan pemerintahan Brebes dengan sangat baik.

Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 5.035.887 orang pemilih pemula pada Pemilu 2019. Data ini masuk dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Jumlah ini diperoleh dari hasil pengurangan total Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan data penduduk wajib KTP elektronik. Dalam laporan terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sekitar 55%

pemilih milenial/pemilih pemula (17-38 tahun) yang ikut dalam Pemilu 2019. (<https://analisa.id/pentingnya-mengapa-milenial-harus-melek-politik/04/12/2018/> diakses Selasa, 27 November 2019, 19.33 WIB)

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2012, 79% anak muda di Indonesia tidak tertarik berpolitik. Selain itu, menurut Alvara Research Center, hanya 22% generasi milenial yang mengikuti perkembangan politik. Sisanya lebih senang baca berita olahraga, IT, *lifestyle*, dan hiburan. (<https://penakata.com/antara-apatis-dan-kurang-melek-politik-terhadap-debat-capres/> diakses Selasa, 27 November 2019, 19.44 WIB).

Diryo S dkk dalam tulisannya menyatakan bahwa partisipasi politik di kabupaten Brebes tergolong rendah. Berdasarkan perolehan suara di tingkat kabupaten brebes menunjukkan partisipasi pemilih hanya 55,4% atau 838.167 dari 1.531.813 DPT, dan 44% atau 693.646 orang tidak mengikuti proses dan kegiatan politik (Pilkada). Dan dapat ditarik kesimpulan dari tulisannya maka partisipasi politik rendah dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu faktor rendahnya tingkat pendidikan. Dimana pendidikan sangat penting dalam menunjang literasi politik masyarakat, dengan rendahnya tingkat pendidikan ini menyebabkan kurangnya literasi politik di Kabupaten Brebes.

Untuk meningkatkan kecerdasan dan daya kritis para pemilih pemula, berbagai pihak utamanya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah maupun peserta pemilu (khususnya partai politik) telah melakukan berbagai upaya pendidikan pemilih (*voter education*) terutama melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi. Hanya saja, oleh karena keterbatasan ruang waktu, media dan metodenya, kegiatan-kegiatan sosialisasi ini praktis kurang memberikan dampak yang berarti untuk menumbuhkan kecerdasan dan daya kritis (literasi politik) pemilih pemula.

Situasi kurangnya literasi politik pada pemilih pemula secara hipotesis juga dapat menyebabkan apatisisme politik (sikap tak acuh, tidak peduli), bahkan hingga level sinisme terhadap politik. Aktivitas, bahkan sekedar peduli terhadap

isu-isu politik dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia belaka. Di sisi lain lagi, para pemilih pemula dengan literasi politik yang rendah juga potensial mudah dikooptasi dan dimobilisasi oleh rezim otoriter untuk kepentingan semata-mata mempertahankan status quo kekuasaan. Pada titik serupa situasi ini, para pemilih pemula yang secara kuantitas signifikan dari pemilu ke pemilu praktis tidak akan memberi kontribusi positif terhadap penguatan dan pengembangan demokrasi.

Berdasar nalar dan argumentasi itulah peningkatan literasi politik pada pemilih pemula menjadi sangat urgen diikhtiarkan sepanjang waktu dan, idealnya dilakukan oleh berbagai pihak yang kompeten dan memiliki akses otoritas pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan terhadap kelompok ini, misalnya sekolah, kampus, pesantren, organisasi kemahasiswaan, ormas kepemudaan serta kelembagaan negara yang relevan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda, Kementerian Dalam Negeri serta perangkat kelembagaan hierarkinya di daerah.

Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik meneliti mengenai literasi politik bagi pemilih pemula melalui pendidikan politik pada PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari informan, lembar angket serta studi dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket dan studi dokumen. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model Milles dan Hubermas yaitu tiga alur kegiatan yang akan dilakukan secara bersamaan yakni melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Sample/objek yang menjadi sumber data adalah ketua, pengurus dan anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes sejumlah 57 orang dari keseluruhan populasi 100 orang.

HASIL

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa penelitian ini mencoba untuk menjawab bagaimana implementasi dan tingkat literasi anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes, maka hasil dari pembahasan penelitian dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Pendidikan politik dalam meningkatkan *political literacy* PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes

Melek politik atau literasi politik menjadi faktor determinan dalam pendidikan politik, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlihat dalam terlibat dalam proses politik.

Organisasi memiliki peran penting dalam pendidikan politik, salah satunya berfungsi sebagai media penyaluran pendidikan politik. Pengurus IPNU-IPPNU sudah melaksanakan pendidikan politik kepada pengurus dan anggota, dimana pengurus dan anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ialah pemilih pemula. Pemilih pemula sejalan dengan UU No.10 Tahun 2008 bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Dari hasil wawancara maka anggota dan kader PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes merupakan pemilih pemula, karena usia anggota kader dimulai dari usia 13-27 tahun dimana usia tersebut dijelaskan pada UU No.10 Tahun 2008 merupakan usia pemilih pemula.

Berdasarkan tipologi Almond dan Verba (1990:16) orientasi politik pemilih pemula ini dikategorikan menjadi :

- a. Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan tentang kandidat;
- b. Orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan;
- c. Orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa usia pemilih pemula sangat membutuhkan pendidikan politik, dan pemilih pemula memiliki peranan sangat penting dalam proses politik. dan untuk memberikan pemahaman tentang politik maka dilakukan pendidikan politik di lingkungan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes. Kegiatan pendidikan politik sejalan dengan Sudiarja yaitu Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan yang membawa perubahan pada diri individu terdidik (Sudiarja, 2006:413).

Keberjalanan pendidikan politik di PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ini sudah cukup baik, dilihat dari program kerja seminar dan sosialisasi yang dilaksanakan. Program tersebut pun cukup efektif untuk diajarkan kepada anggotanya agar melek politik. ada 2 program kerja dalam pendidikan politiki di PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ialah seminar milenial dan sosialisasi “Pendidikan Memilih” dimana dalam program tersebut dijelaskan mengenai proses-proses politik. Hasil dari pendidikan politik tersebut adanya tindak lanjut, bentuk dari tindak lanjut tersebut adalah dengan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat sekitar. Pendidikan politik di PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes akan terus dilaksanakan setiap periodenya dan dapat disesuaikan waktunya. misalkan bertepatan dengan pilkada atau pilpres.

Pendidikan berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 ialah suatu usaha sadar serta terencana untuk dapat mewujudkan suasana belajar & proses pembelajaran supaya peserta didik dengan secara aktif mengembangkan atau menggali potensi dirinya untuk bisa atau dapat mempunyai kekuatan pengendalian diri, spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian

dan juga keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara.

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda menyebutkan tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat sebagai berikut:

- a. Sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara.
- b. Sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini.
- d. Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
- e. Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.
- f. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan bangsa dan bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional.
- g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
- h. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi, dan seimbang.
- i. Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain di luar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atas dasar pola pikir dan penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Westholm et al. (1990) dalam Karim dkk (2015: 5) menyatakan, bahwa literasi politik pada dasarnya adalah kompetensi warga negara, suatu kompetensi yang dibentuk Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan seperti yang sudah disebutkan di atas, serta sejalan dengan R. Hayer menyebut pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia partisipan yang bertanggung jawab dalam politik agar seorang warga negara siap menjalankan perannya dalam kehidupan demokrasi. Berbasis pemahaman tersebut di atas, literasi politik dengan demikian meniscayakan adanya elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dan diukur. Ringkasnya, literasi politik pada dasarnya merupakan senyawa yang utuh dari pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afeksi). Jadi pendidikan politik dapat menghasilkan

pengetahuan tentang politik, budaya politik, isu-isu politik, dll atau bisa disebut pendidikan politik dapat menghasilkan literasi politik.

Magdalena, dkk (2020: 133) dalam tulisannya menyebutkan 3 klasifikasi atau aspek dalam hasil pembelajaran menurut bloom ada yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Dimana dalam tulisan ini juga berhubungan dengan hasil belajar, yaitu :

1. Ranah Kognitif

Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penelitian dan penalaran.

2. Ranah Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar

3. Ranah Psikomotor

Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik (motorik) yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif.

Dari ketiga ranah tersebut sejalan dengan Program kerja yang dilaksanakan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes sudah cukup efektif untuk memberikan pembelajaran pendidikan politik khususnya literasi politik para anggota. Efektivitas program kerja itu sangat berpengaruh dalam interaksi politik para pengurus dan anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes. Pendidikan politik ini memberikan pemahaman kepada anggota dan pengurus tentang tata cara memilih dan politik lainnya, pendidikan politik sudah dilaksanakan dengan baik setiap periodenya dijalankan yaitu kegiatannya ada seminar milenial dan pendidikan memilih. Adanya pendidikan politik ini apa

menambah literasi pada pengurus atau anggota dan masyarakat, serta adanya pendidikan politik ini membuat anggota dan pengurus itu ikut berpartisipasi ketika ada Pemilu ataupun dia mengerti tentang pendidikan politik.

Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan lingkungan politik, menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal. Pemilih pemula mengalami berbagai bentuk kendala politik dalam menentukan pilihan politiknya. Diantara persoalan yang dihadapi pemilih pemula adalah kebingungan politik dari situasi politik saat ini yang tidak pasti. Berbagai persoalan politik seperti korupsi, masalah hukum, membuat pemilih pemula cenderung apatis terhadap politik. Apatisme politik ini disebabkan oleh rusaknya citra lembaga-lembaga penyelenggara negara dan pergeseran orientasi partai politik. Dengan adanya pendidikan politik dapat menjadikan pengurus dan anggota pemilih pemula di PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes menjadi sadar dan tidak bodoh amat dalam urusan politik.

Literasi politik sejalan dengan Denver dan Hands (1990) dalam Karim dkk (2015:5), Literasi Politik (*political literacy*) merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga negara.

Literasi politik bukan sekedar pengetahuan politik, melainkan aktivitas yang mengedepankan edukasi politik dalam melahirkan warga negara yang memiliki kesadaran kritis serta mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai dinamika politik secara efektif. Literasi politik harus disadari sebagai konsep yang bersifat evolutif dan membutuhkan waktu. Generasi muda dan pemilih pemula memerlukan pendampingan bagi penguatan kapasitas intelektual mereka dalam politik berikut juga dengan edukasi etika politik melalui pendidikan politik.

Pendidikan politik dalam tulisan ini dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan sukarela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Pendidikan politik yang seharusnya dilaksanakan ini mengandung tiga unsur penting, yakni: Pertama, adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Kedua, perbuatan dimaksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan sukarela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Latihan yang dimaksud ialah proses melakukan sesuatu secara berulang-ulang, dimana latihan yang dimaksud dari pendidikan politik PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ialah dapat melatih pengurus dan anggota sebagai warga negara agar meningkat partisipasi politiknya. Serta memberikan pembelajaran pendidikan politik secara teratur dan berulang setiap periode kepengurusan kepada pengurus dan anggotanya.

Ajaran pendidikan politik PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ialah upaya mengembangkan pengetahuan serta penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara terus menerus kepada pengurus dan anggota tentang politik, budaya politik serta proses politik, dll. Hal ini agar pengurus dan anggota mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab sebagai warga negara.

Bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ialah untuk membentuk pengurus dan anggota

yang sadar akan status atau kedudukan politiknya di tengah masyarakat, serta agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Jadi bukan hanya pengetahuan politik saja namun juga memberikan pemahaman tentang kegiatan politik.

Adanya pendidikan politik diharapkan setiap pengurus dan anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes dapat mengenal dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan, serta dengan adanya pendidikan politik mereka tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong agar warga negara (para pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai, sekaligus kesadaran akan suatu pentingnya sistem politik yang ideal. Jadi pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan anggota dan pengurus PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam berpolitik. Sebab partisipasi aktif itu mempunyai pengaruh dan kekuatan, rakyat bisa ikut dalam pengawasan terhadap perbuatan mengatur masyarakat dan negara. Maka menjalani proses politik lewat pendidikan politik dan belajar berpolitik.

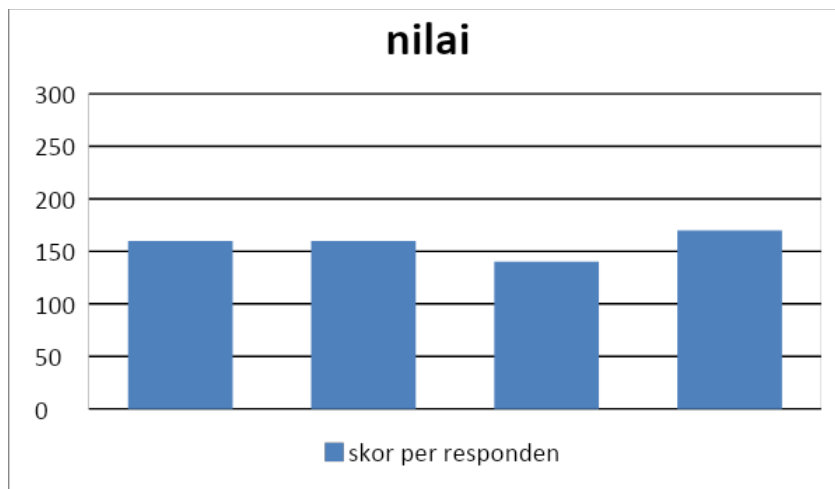
Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes sudah meliputi tiga unsur di atas, yakni: PC IPPNU-IPPNU Kabupaten Brebes sudah memberikan latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi pengurus serta anggota nya. Dengan diadakannya seminar milenial yang bertujuan memberikan pendidikan sebagai warga negara Indonesia dalam hidup berdemokrasi, memberikan pendidikan politik untuk bekal masa depan., dan memberikan pemahaman politik berkemanusiaan. Serta adanya kegiatan sosialisasi pemilih yang bertujuan sebagai pendidikan politik bagi masyarakat khususnya pemilih, penanaman nilai –nilai demokrasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan

mekanisme pilkada, dan bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai landasan-landasan normatif dan hukum positif yang mengatur mengenai pilkada. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap periodenya melalui proses dialog pada seminar dan sosialisasi sehingga para anggota dapat memiliki kesadaran demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Hal yang belum dilaksanakan dalam pendidikan politik PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes yaitu belum maksimalnya kegiatan tindak lanjut setelah adanya seminar dan sosialisasi pendidikan politik. Sehingga seharusnya kegiatan tindak lanjut para pengurus dan anggota dapat diperbaiki dan maksimalkan lagi agar kegiatan pendidikan politik ini hasilnya semakin bagus dan maksimal.

2. Tingkat *political literacy* PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes dari data kuesioner

Rendahnya literasi politik khususnya pemilih pemula menyebabkan apatisme terhadap politik (sikap tak acuh, tidak peduli), bahkan hingga level sinisme terhadap politik. Aktivitas, bahkan sekedar peduli terhadap isu-isu politik dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia belaka. Di sisi lain lagi, para pemilih pemula dengan literasi politik yang rendah juga potensial mudah dikooptasi dan dimobilisasi oleh rezim otoriter untuk kepentingan semata-mata mempertahankan status quo kekuasaan. Pada titik serupa situasi ini, para pemilih pemula yang secara kuantitas signifikan dari pemilu ke pemilu praktis tidak akan memberi kontribusi positif terhadap penguatan dan pengembangan demokrasi. Maka peningkatan literasi politik pada pemilih pemula menjadi sangat urgen diikhtiarkan sepanjang waktu dan, idealnya dilakukan oleh berbagai pihak yang kompeten dan memiliki akses otoritas pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan terhadap kelompok ini, misalnya sekolah, kampus, pesantren, organisasi kemahasiswaan, ormas kepemudaan serta kelembagaan negara yang relevan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda, Kementerian Dalam Negeri serta perangkat kelembagaan hierarkinya di daerah.



Gambar 1. Skor per responden lembar angket

Literasi Politik Pemilih Pemula (PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes) Terbilang cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil angket atau kuesioner yang kemudian di analisis. Nilai perolehan responden yang diperoleh dari hasil angket Literasi Politik adalah 3.931 dan jika di rata- rata dengan jumlah data (jumlah responden) maka mendapat rata-rata 180 . Adapun persentase Literasi Politik PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes yaitu 69%. Dan dari keseluruhan tersebut mereka paham akan literasi politik dan mengkan ilmu atau pengetahuan literasi politik mereka dalam kehidupan, seperti mematuhi aturan politik dan memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum. Hal ini menunjukkan Literasi Politik bagi pemilih pemula dalam pendidikan politik IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes cukup baik. Sebagian responden menerapkan literasi politik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang diukur dalam Literasi Politik bagi pemilih pemula dalam pendidikan politik ialah pengetahuan dasar soal politik dan literasi politik, seperti budaya politik, isu-isu politik, proses dll. Literasi politik merupakan bentuk kemampuan pengetahuan responden dalam kehidupan politik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Denver dan Hands (1990) dalam Karim dkk (2015:5), Literasi Politik (*political literacy*) merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan

dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga negara. politik dalam mewujudkan warga Negara yang terdidik (*educated citizen*). Literasi politik bukan sekedar pengetahuan politik, melainkan aktivitas yang mengedepankan edukasi politik dalam melahirkan warga negara yang memiliki kesadaran kritis serta mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai dinamika politik secara efektif. Lebih lanjut berdasarkan laporan “Workshop on *Political literacy*” (2002) dengan topik *Political literacy within ITT Citizenship education* menyimpulkan agar literasi politik menjadi kenyataan, maka harus didefinisikan dan dibuat sebagai keahlian berbagi sehingga aktivitas ini sarat dengan konten dan disampaikan melalui transmisi model. Literasi politik ini memiliki potensi memberikan kewarganegaraan dengan dasar pengetahuan, ketelitian, sisi “keras” dan basis intelektual.

Dalam penelitian ini juga sejalan dengan 4 elemen literasi politik dalam karim (2015) yaitu :

- 1) Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, kewenangan, dan perannya
- 2) Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik
- 3) Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik
- 4) Partisipasi dalam kegiatan politik.

Anggota dan kader IPNU-IPPNU sadar akan pentingnya pendidikan politik yang menghasilkan literasi politik dimana di dalam literasi politik terdapat banyak pengetahuan politik dari sistem, proses- proses politik, institusi apa saja di dalam politik kewenangan dan perannya masing-masing serta mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan publik melalui program kerja pendidikan politik di PC IPNU- IPPNU Kabupaten Brebes. Anggota dan kader juga mampu

mengembangkan dirinya dan memiliki nilai-nilai politik dan memiliki keterampilan serta percaya diri dalam praktek politik, mengetahui dimana dan bagaimana keputusan dibuat dalam lingkungan dan kehidupan sehari-hari misalnya mampu memutuskan kandidat mana yang akan dipilih dalam pemilihan serta tidak menerima uang suap (*money politic*). Serta hasil dari pendidikan politik ini adalah mereka dapat menerapkan pengetahuannya tentang politik dengan berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti menggunakan hak suaranya ketika ada pemilihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di lapangan, serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait *political literacy* bagi pemilih pemula melalui pendidikan politik (di PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan politik dalam meningkatkan *political literacy* PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes

Berdasarkan hasil penelitian, program Seminar Milenial dan Sosialisasi “Pendidikan Memilih” termasuk dalam kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh IPNU-IPPNU Kab Brebes secara rutin satu tahun sekali. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam program ini mampu membentuk pribadi yang bertanggung jawab dalam politik serta pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik.

Pendidikan politik dalam meningkatkan *political literacy* IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes pada kenyataannya sudah cukup baik dengan diadakannya kegiatan seminar milenial dan sosialisasi “pendidikan memilih” yang cukup efektif dalam penyaluran pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat. Beberapa tujuan pendidikan politik yang sudah tercapai ialah penanaman nilai-nilai demokrasi, memberikan pemahaman kepada anggota dan masyarakat mekanisme proses politik dalam hal ini dikhususkan pada mekanisme pemilu dan pilkada, bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai landasan-landasan normatif dan hukum positif yang mengatur

mengenai proses politik, memberikan pendidikan politik untuk bekal masa depan serta memberikan pemahaman politik berkemanusiaan.

Pendidikan politik pada pelaksanaannya menunjukkan bahwa anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ialah pemilih pemula, dan mereka melek akan politik atau mempunyai literasi politik yang baik. PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes melaksanakan Pendidikan Politik yang bertujuan untuk bekal masa depan anggota dan untuk meningkatkan literasi politik anggota. Literasi politik yang dimaksud ialah pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga negara.

2. Tingkat *political literacy* PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes

Bentuk literasi politik IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ini ditunjukkan melalui pendidikan politik yang dilaksanakan dengan program kegiatan seminar milenial dan sosialisasi pendidikan memilih.

Literasi Politik Pemilih Pemula PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes terbilang cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil angket atau kuesioner yang kemudian dianalisis. Nilai keseluruhan responden yang diperoleh dari hasil angket Literasi Politik adalah 3.931. Adapun persentase Literasi Politik IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes yaitu 69%. Dan dari keseluruhan tersebut mereka paham akan literasi politik dan mengkan ilmu atau pengetahuan literasi politik mereka dalam kehidupan, seperti mematuhi aturan politik dan memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum. Aspek yang diukur dalam Literasi Politik bagi pemilih pemula dalam pendidikan politik anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Brebes ini adalah pengetahuan dasar soal politik dan literasi politik, seperti budaya politik, isu-isu politik, proses politik, dll. Serta pendidikan politik melahirkan literasi politik bukan hanya sekedar pengetahuan politik saja, namun aktivitas yang mengedepankan edukasi atau pengetahuan politik untuk melahirkan warga negara yang memiliki kesadaran politik yang kritis serta mendorong para anggota berpartisipasi secara aktif dalam berbagai dinamika politik secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA JURNAL

- Akhmad, D. (2018). Fenomena Melek POLitik (Political Literacy) Masyarakat Kota Amuntai Hulu Sungai Utara . *As Siyasa*, Vol. 3, No. 2, November 2017 ISSN: 2549-1865.
- Chalik, A. (2015). *Survey Tingkat Melek Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Gresik Tahun 2015*.
- Erawati & Sari. (2017). Peran Ikatan Pelajar Muhammadiyah (Ipm) Dalam Pendidikan Politik Di Sma Muhammadiyah 2 Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 05 Nomor 01 Tahun 2017, 227 – 241.
- Isniarti, T. (2014). *Literasi Politik Jelang Pemilihan Presiden (PILPRES) 2014 di Media Sosial Kompasiana*.
- Karim. (2015). “Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Sleman”.). “Memahami Tingkat Melek Politik Laporan Penelitian, Sleman : JPP FISIPOL UGM dan KPU Sleman.
- Magdalena, dkk. (2020). Tiga Ranah Taksonomi Bloom Dalam Pendidikan. *Jurnal Edukasi dan Sains* Volume 2, Nomor 1, Juni 2020; 132-139
- Putri, N. E. (2015). Peningkatan Literasi Politik Melalui Kebijakan Berbasis Gender Di Solok”. *Peningkatan Literasi Politik Melalui Kebijakan Ber Dalam Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Volume V Nomor 1 Tahun 2015.
- Putri, N. E.. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi*, 51-71.
- Ratnamulyani & Maksudi (2018). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. ISSN 141-0903: 2443-2660. Vol 20. No 2 juli 2018
- Suparto, D. (2018). Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Brebes Tahun 2017 (Studi Komunikasi Politik Tentang Perilaku Pemilih di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Vol 4, no 2, 2018.

- Sutisna. (2017). Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula melalui Pendidikan Pembelajaran Kontekstual. P-ISSN:2303-2898. Vol 6, No 2, Oktober 2017
- Wahyuningsih, E. (2013). Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Pangkalpinang. Universitas Pendidikan Indonesia
- Wardhani. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 10 (1) (2018): 75-62 Yulianto, M. (2018, April Senin). Literasi Politik dan Media Sosial.

BUKU

- Almond, Gabriel A. & Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik : Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta, Bina Aksara
- Arifin, A. (2014). *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kamilun, R. (2011). *Buku Saku IPNU-IPPNU Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Adi Offset.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Komariah, D. S. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Modul 1 KPU (2010:48). Pemilih Untuk Pemula
- Riduwan. (2012). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk Mahasiswa S-1, S-2, S-3)*. Bandung: Alfabeta.
- Sastroatmojo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press. Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan (Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sucipto, A. (2015). Budaya Politik Lokal Dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal ilmu sosial MAHAKAM*, Volume 4 No 1 2015 ISSN: 2302-0741.
- Sudiarja. (2006). *Karya Lengkap Driyarkarya*. Jakarta: Obor.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

PERUNDANG-UNDANGAN

UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD,DPRD

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

WEB

Muslimin. (2019).Politik Uang Tinggi karena Pendidikan Politik Rendah. diperoleh Selasa, 26 November 2019, 16:11 WIB, dari <https://www.liputan6.com/pileg/read/3892742/charta-politika-politik-uang-tinggi-karena-pendidikan-politik-rendah>

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). (2019). Pentingnya mengapa milenial harus Melek Politik. diperoleh Selasa, 27 November 2019, 19.33 WIB, dari <https://analisa.id/pentingnya-mengapa-milenial-harus-melek-politik/04/12/2018/>